

Jaksa KPK Disebut Bisa Ajukan PK atas Vonis MA di Kasus Edhy Prabowo

JAKARTA (IM) - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bisa melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK), atas putusan kasasi pada Mahkamah Agung (MA) yang memangkas hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo dari 9 tahun menjadi lima tahun penjara.

“Salah satu cara koreksi atas putusan kasasi itu adalah dengan mengajukan peninjauan kembali (PK). Jaksa bisa melakukan PK lagi supaya hukumannya dikembalikan,” kata Abdul kepada wartawan, Kamis (10/3).

Menurut Abdul ada dua alasan mendasar bagi jaksa penuntut umum mengajukan PK, yakni ada bukti baru yang ditemukan atau ditemukan kekeliruan atau kekhilafan hakim ketika melakukan penuntutan.

“Saya kira alasan yang kedua bisa menjadi alasan PK untuk mengubah putusan yang meringankan terdakwa korupsi Edhy Prabowo,” ujar Abdul.

Pada pengadilan tingkat pertama, Edhy dinyatakan terbukti bersalah menerima suap ekspor dan budidaya benih bening lobster (BBL). Ia pun dijatuhi vonis 5 tahun penjara dan denda senilai Rp 400 juta subsider 6 bulan

kurungan. Ia juga dijatuhi pidana penghanti senilai Rp 9,68 miliar dan 77.000 dollar Amerika.

Edhy melalui kuasa hukumnya lantas mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Oleh majelis hakim PT Jakarta hukumannya justru diperberat menjadi 9 tahun penjara.

Setelah itu, Edhy mengajukan kasasi ke MA. Tiga majelis kasasi MA yakni Sofyan Sitompul, Gazalba Saleh dan Sinitha Yuliansih memutuskan memangkas hukuman Edhy menjadi 5 tahun penjara pada Senin (7/3).

Majelis kasasi tetap menegakan hukuman pidana uang pengganti sebesar Rp 9,68 miliar dan 77.000 dolar Amerika Serikat atau Rp 1,09 miliar kepada Edhy.

Majelis kasasi menilai Edhy telah bekerja dengan baik dengan mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020.

Dalam amar putusannya, para hakim menganggap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 adalah upaya untuk menjahterakan rakyat khususnya nelayan kecil. ● **mei**

2 Polhukam

FOTO:ANT



KETUM GOLKAR KUNJUNGI DPP NASDEM

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di DPP Partai NasDem, Jakarta, Kamis (10/3). Kunjungan Ketua Umum Partai Golkar ke DPP Partai NasDem tersebut untuk bersilaturahmi serta membahas isu-isu terkini.

Bambang Susantono Mohon Dukungan Masyarakat untuk Bangun Kota Nusantara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Bambang Susanto sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Kamis (10/3) sore.

JAKARTA (IM) - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono, usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Kamis (10/3), meminta dukungan masyarakat Indonesia untuk pembangunan Kota Nusantara.

Dia berharap dukungan masyarakat dapat menyukseskan pembangunan IKN yang inklusif, hijau, cerdas dan berkelanjutan.

“Kami mohon dukungan semua lapisan masyarakat untuk sama-sama kita membangun Kota Nusantara sehingga menjadi kota yang inklusif, hijau, cerdas dan berkelanjutan,”

ujar Bambang saat memberikan keterangan pers di Istana Negara, Kamis (10/3).

“Kota ini adalah kota yang merefleksikan kenusantaraan, kekitaan. Semua tentu dengan kearifan lokal yang sangat tinggi sesuai lokasi yang berada di Kalimantan Timur,” tegasnya.

Bambang menuturkan, dirinya dan Dhony Rahajoe (Wakil Kepala Otorita IKN) mendapatkan amanah untuk membangun kota yang cocok untuk semua kalangan atau city for all. Menurutnya, untuk membangun kota dengan baik memerlukan waktu sekitar 15-20 tahun.

“Dengan demikian, kota

itu benar-benar mempunyai roh atau soul of the city. Kita membangun kota tidak hanya membangun fisiknya,” ungkap Bambang.

“Tapi terutama bagaimana kerekatan sosial, interaksi antarwarganya, bagaimana kota tersebut benar-benar akan menjadi jadi kota layak huni, humanis, dan livable,” katanya menambahkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Bambang Susanto sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Kamis (10/3) sore.

Sebelum dilantik, pasangan tersebut terlebih dahulu menerima petikan surat keputusan presiden (Keppres). Bambang dan Dhony dilantik berdasarkan Keppres Nomor 9 M tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

“Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan

pengangkatan saudara-saudara sebagai kepala dan wakil kepala otorita ibu kota Nusantara terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, Bersedialah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama islam?” tanya Jokowi.

“Bersedia,” jawab Bambang dan Dhony.

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Serta berbakti kepada ma-

sarakat, nusa dan bangsa,” demikian kutipan pengambilan sumpah yang dibacakan Presiden Jokowi yang diikuti oleh Bambang dan Dhony.

Diketahui dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang IKN, jabatan kepala otorita IKN Nusantara akan sejajar dengan Menteri dan berbeda dengan kepala daerah lainnya.

Kepala Otorita IKN dan Wakilnya bakal memegang jabatan selama 5 tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

Selain itu, Kepala Otorita dan wakilnya dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan berakhir. ● **han**

Total Aset Tersangka Kasus Korupsi LPEI yang Disita Lebih dari Rp2 T

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung kembali melakukan penyitaan dan pengamanan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan Ekspor Nasional Oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2013-2019. Total aset yang disita lebih dari Rp2 triliun.

“Dari hasil tindakan penyitaan dan pengamanan tersebut, hingga 10 Maret 2022, Tim asset tracing penyidikan pada Jampidsus telah mengamankan dan menyelamatkan aset dalam perkara LPEI sebesar Rp 2.027.701.024.000,” kata Kapuspenkum Kejaksaan, Ketut Sumedana, Kamis (10/3).

Berikut rincian tambahan aset yang disita penyidik Kejaksaan Agung:

1. Delapan bidang tanah seluas 621.489 M2 yang terletak di Jalan Jendral Basuki Rachmat, Kelurahan Pengantingan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dengan nilai estimasi aset sebesar Rp932.233.500.000 yang disita dari Tersangka JD pada tanggal 09 Maret 2022.

2. Empat unit mesin dan peralatan PT. Kertas Basuki Rachmat dengan nilai estimasi aset sebesar Rp500.000.000.000 yang disita dari Tersangka JD pada tanggal 09 Maret 2022;

3. Disita juga aset berupa 76 bidang tanah milik tersangka JD dan tersangka S dengan nilai estimasi aset sebesar Rp595.467.524.000 di enam tempat.

Dari 76 lokasi itu, sebanyak enam tempat tersebut di antaranya di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi. ● **han**

800 Handphone Disita dari Kamar Tahanan di Lapas Salemba Kelas II A

JAKARTA (IM) - Sebanyak 800 telepon genggam berhasil diamankan petugas sipir dari kamar hunian di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Salemba Kelas II A Jakarta Pusat, Kamis (10/3).

Kalapas Salemba Kelas II A Yosafat Rizanto mengatakan, ratusan telepon genggam tersebut merupakan hasil sitaan dalam waktu 2020 hingga 2021.

“Kita amankan semuanya dari hasil sidak petugas kami. Selain telepon seluler, ratusan kabel charger, dan power bank juga turut diamankan,” kata Yosafat Rizanto dalam keterangannya, Kamis (10/3).

Menurut Yosafat, telepon genggam tersebut langsung dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam wadah kemudian dibakar. Setelah penemuan tersebut, menurut Yosafat, petugas langsung gencar melakukan razia ke dalam hunian selama satu minggu ini.

“Anggota kami gencar lakukan razia, barang yang tidak masuk ke dalam seperti handphone, power bank, charger kerap kita dapati,” ungkapnya.

Sebelumnya, Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Kelas II Salemba, Jakarta Pusat



PELAPORAN SPT BAGI ASN

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menunjukkan aplikasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2021 di Pendopo Indramayu, Jawa Barat, Kamis (10/3). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Kepala Daerah termasuk kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk segera melaporkan SPT Pajak secara tepat waktu dengan batas hingga tanggal 31 Maret 2022.

Masyarakat Diimbau Tak Beraktivitas di Daerah Potensi Bahaya Gunung Berapi

JAKARTA (IM) - Badan Geologi melalui PVMBG-BPPTKG menyatakan status Gunung Merapi masih Siaga atau Level III meskipun sempat bergejolak sejak Rabu 9 Maret 2022. Status tersebut berlaku sejak 5 November 2020 silam.

Kepala Badan Geologi, Eko Budi Lelono mengatakan setelah ditetapkan Siaga, dua bulan setelahnya yaitu tanggal 4 Januari 2021 PVMBG-BPPTKG menyatakan Gunung Merapi memasuki masa erupsi efusif.

Masa tersebut ditandai dengan aktivitas berupa pertumbuhan kubah lava, guguran, dan awan panas guguran.

“Saat ini Gunung Merapi memiliki 2 kubah lava, yaitu kubah lava barat daya dan kubah lava tengah kawah,” ujar Eko, Kamis (10/3).

Berdasarkan analisis foto udara tanggal 20 Februari 2022 volume kubah lava barat daya terhitung sebesar 1.578.000 m3 dan kubah tengah sebesar 3.228.000 m3. Kedua kubah memiliki karakteristik berbeda karena lokasinya.

Kemudian tadi malam, yaitu tanggal 9 Maret 2022 pukul 23.18 WIB terjadi retentanan awan panas guguran di Gunung Merapi. Hingga pukul 06.00 pagi ini, tercatat 16 kali awan panas guguran dengan jarak luncur maksimal kurang lebih 5 km ke arah tenggara yaitu di alur Kali Gendol.

“Awan panas guguran ini menyebabkan hujan abu ke beberapa tempat terutama di sisi barat laut Gunung Merapi sejauh maksimal 13 Km,” ungkapnya.

Menurut Eko, aktivitas erupsi saat ini terhitung masih tinggi di mana guguran terjadi rata-rata sebanyak 140 kali/hari.

Aktivitas vulkanik internal juga masih tinggi ditunjukkan oleh data seismisitas dan deformasi. Seismisitas internal terjadi lebih dari 5 kali/hari, sedangkan laju deformasi EDM RB1 sebesar 3,5 mm/hari.

Berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental, maka mereka menyimpulkan jika aktivitas vulkanik Gunung Merapi ditetapkan pada tingkat “Siaga”.

Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan-barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedog, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km.

Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak.

Terkait dengan aktivitas saat ini, kepada para pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana Gunung Merapi pihaknya merekomendasikan pemerintah setempat mengambil langkah yang diperlukan. Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten dihimbau melakukan upaya-upaya mitigasi dalam menghadapi ancaman bahaya erupsi Gunung Merapi yang terjadi saat ini.

“Masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Masyarakat agar mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi serta mewaspadai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. ● **mei**

Yusuf Mansur Diminta Bayar Dana Investasi Penggugat Dikonversi ke Harga Emas 2021

TANGERANG (IM) - Jama'an Nurhotib Mansur alias Ustaz Yusuf Mansur diminta mengembalikan dana investasi ke-12 penggugatnya dalam kasus ingkar janji (wanprestasi) dengan nilai emas per gram pada tahun 2021.

Sebagaimana diketahui, ada 12 orang yang mengajukan gugatan kepada Yusuf Mansur karena menjadi korban wanprestasi dana investasi hotel haji/umrah bernama Hotel Siti di Kota Tangerang. Pengembalian dana investasi itu disampaikan oleh kuasa hukum para penggugat yang bernama Ichwan Tony saat agenda mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Kota Tangerang, Kamis (10/3).

Ichwan menyebut, total dana investasi yang harus dikembalikan oleh Yusuf Mansur sebesar Rp 273.722.000 (Rp 270 juta). Dana yang harus dikembalikan itu merupakan akumulasi dari dana investasi setiap penggugat yang kemudian dikonversikan ke nilai emas tahun 2021 atau saat Ichwan mengajukan gugatan.

“Total uang yang harus dikembalikan Ustaz Yusuf Mansur sebanyak Rp 273.722.000 juta,” papar Ichwan saat ditemui sesuai sidang mediasi, Kamis (10/3). Akumulasi dana investasi yang dikonversikan ke nilai emas itu tercantum dalam proposal perdamaian. Saat mediasi pada Kamis (10/3) ini, proposal tersebut sudah diajukan Ichwan dan tim kepada kuasa hukum Yusuf Mansur dan dua tergugat lain dalam kasus yang sama.

Dalam proposal itu, tercantum besaran investasi masing-masing penggugat yang telah dibayarkan ke Yusuf Mansur pada tahun 2013. Besaran investasi itu variatif, mulai belasan juta hingga puluhan juta setiap penggugatnya.

Kemudian, Ichwan menawarkan agar Yusuf Mansur hanya mengembalikan besaran investasi dari para penggugatnya saja. Namun, besaran setiap duit yang digelontorkan para penggugat itu dikonversikan ke harga nilai emas.

Ichwan mencontohkan, seorang penggugat mengeluarkan uang sebesar Rp 10 juta untuk investasi tersebut

pada tahun 2013. Pada tahun 2013, Rp 10 juta setara dengan 16,6 gram emas. Lalu, nilai emas pada tahun 2013 itu dikonversikan dengan nilai emas pada tahun 2021 atau pada saat Ichwan mengajukan gugatan. Dengan demikian, emas sebesar 16,6 gram emas setara dengan Rp 15.454.000.

“Klien kami investasi Rp 10 juta tahun 2013. Kita cuma minta dikembalikan saja yang Rp 10 juta itu, tapi dikonversikan (ke nilai) emas,” papar Ichwan.

“Tapi kalau emas 16 gram (setara Rp 10 juta pada tahun 2013), kita konversikan (ke tahun 2021), harganya kan Rp 15 juta. Ya sudah dikembalikan Rp 15 juta,” sambungnya.

Sebagai informasi, Yusuf merupakan tergugat dua dalam kasus perdata ini. Selain Yusuf, dua tergugat lain adalah PT Inext Arsindo selaku tergugat pertama dan Jody Broto Suseno sebagai tergugat ketiga. Ketiga tergugat diwakili kuasa hukum yang sama, yaitu Ariel Mochtar dkk. Ariel hadir saat mediasi berlangsung di PN Tangerang pada Kamis (10/3) siang. ● **han**



AKSI DAMAI HENTIKAN PERANG RUSIA-UKRAINA

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam “Aliansi Masyarakat Cinta Damai” melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Kamis (10/3). Dalam aksi tersebut mereka menyerukan untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina serta mewujudkan perdamaian.

DIJUAL CEPAT

Di Jual Tanah Dan Bangunan Apartemen Seluas ± 146 M² yang Terletak Di Rusun Hunian & Non Hunian Mal & Kondominium Taman Anggrek Blok Kirchara Lt. 35 No. 35D Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat (Jl. Sd. S. Parman).

**Hubungi : SUFENDI
HP : 0896 6049 5611**